

PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN

(Studi pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2019)

THE INFLUENCE OF INFORMATION ASYMMETRY AND BUDGETARY PARTICIPATION ON BUDGETARY SLACK

(Study on Bandung City Device Performace in Bandung 2019)

Cindi Junika¹, Dini Wahjoe Hapsari² dan Ardan Gani Asalam³

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

iryandiniwulansr@student.telkomuniversity.ac.id, dinihapsari@telkomuniversity.ac.id,
ganigani@telkomuniversity.ac.id³

ABSTRAK

Anggaran publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Dalam pelaksanaannya, APBD sering sekali mengalami permasalahan. APBD harus mampu diandalkan dalam mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem atau tatanan yang tepat dan hasil yang sesuai dengan keadaan serta komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam penyusunan suatu anggaran daerah. Jika dalam sistem penganggaran dalam APBD tidak tepat, maka dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi dan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda dengan menggunakan dengan waktu penelitian tahun 2019. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 43 yang terdiri dari Kasubag Perencanaan pada setiap SKPD Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan partisipasi anggran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Secara parsial, asimetri informasi berpengaruh positif pada kesenjangan anggaran. Partispasi anggaran juga memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung

Kata Kunci: Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran dan Kesenjangan Anggaran.

ABSTRACT

Public budgets can be interpreted as approved and accepted packages that are expected to occur in one or published in the past. In its implementation, the APBD often discusses. The Regional Budget must be able to be relied upon in making decisions that are in line with the objectives of the regional government for the welfare of the community. The right system or order and results that are in accordance with the conditions and good communication are needed in the preparation of a regional budget. If the budgeting system in the APBD is inappropriate, it can lead to a budget slack.

This study aims to determine the effect of information asymmetry and budget participation on the budget gap in the Bandung City Device Performance Unit in 2019. The research method used in this study uses multiple regression techniques using the 2019 research time. Total population in the study there are 43 consisting of the Head of Planning Section at each SKPD in the City of Bandung. The results of this study indicate that information asymmetry and member participation together influence the budget gap. Partially, information asymmetry has a positive effect on the budget gap. Budget participation also has a positive influence on the budgetary slack in the SKPD of Bandung City.

Key words: *Information Asymmetry, Budget Participation and Budgetary Slack.*

1. Pendahuluan

Sesuai dengan UU RI No 23 pasal 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”, dengan demikian pengelolaan sumber daya daerah tentu mengakibatkan daerah mempunyai pendapatannya dan pengeluarannya sendiri. Pemerintah harus berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengembangkan masyarakat agar ikut andil dalam proses pertanggung jawaban eksplorasi sumber daya sekaligus pengembangan sumber-sumber pembiayaan. Pembangunan daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah. Dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa uang maupun sumberdaya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk menciptakan adanya keseimbangan dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengatur kebutuhan daerah, pemerintah memerlukan perencanaan dan pengendalian yang baik dalam pelaksanaannya termasuk dalam menyusun anggaran.

Anggaran publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau pengeluaran yang terjadi di masa lalu. *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, APBD sering sekali mengalami permasalahan. APBD harus mampu diandalkan dalam mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem atau tatanan yang tepat dan hasil yang sesuai dengan keadaan serta komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam penyusunan suatu anggaran daerah. Jika dalam sistem penganggaran dalam APBD tidak tepat, maka dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran. Menurut Anthony dan Govindradjan, kesenjangan anggaran dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi (Lestari dan Supadmi, 2017). Dalam penerapannya kesenjangan anggaran dilakukan agar tingkat pencapaian atau kinerja dari sebuah organisasi dianggap baik agar para penyusun beserta setiap orang yang mempunyai kepentingan mendapatkan insentif.

Kesenjangan anggaran dapat diukur dengan empat komponen yaitu standar anggaran, tuntutan anggaran, tingkat kesulitan dalam pencapaian anggaran, dan target anggaran (Basyir, 2016). Pada tahun 2012 sampai tahun 2016 dilihat dari perbandingan antara anggaran pendapatan daerah dan realisasi anggaran pendapatan daerah serta perbandingan anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada Pemerintahan Kota Bandung dihasilkan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran dan Belanja dengan Realisasi Kota Bandung

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	%	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	%
2012	2.699.863.305.476,63	2.699.959.304.040,00	100	512.562.400.732,38	489.590.967.845,00	95,8
2013	3.106.347.113.010,15	2.943.363.545.965,00	94,75	428.782.513.142,00	342.986.410.586,00	79,9
2014	5.302.471.398.707,15	4.953.940.629.444,00	93,43	5.717.545.328.505,00	4.435.589.826.032,00	77,58
2015	5.455.361.616.094,00	5.098.071.916.848,00	93,5	6.553.368.797.049,00	5.201.938.207.165,00	79,4
2016	6.508.642.846.502,00	6.508.642.846.502,00	100	6.898.076.131.265,00	6.855.932.292.456,00	99,4

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah penulis tahun 2018)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung mengalami perbedaan setiap tahunnya, dengan kurun waktu lima tahun, dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada realisasi anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Bandung menorehkan tingkat pendapatan yang terus-menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi anggaran pendapatan daerah terendah dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2012 sampai tahun 2016 ditunjukkan pada angka Rp. 2.699.959.304 pada tahun 2012 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai nilai tertinggi pada kurun lima tahun tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 6.508.642.502. Sedangkan dalam realisasi anggaran belanja daerah mengalami naik-turun pada tahun 2012 sampai 2016.

Dalam tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa lima tahun berturut-turut Pemerintah Kota Bandung berhasil mendapatkan tingkat realisasi pendapatan daerah di atas sembilan puluh persen. Bahkan pada tahun 2016 dan 2012 realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai 100 %. Pada anggaran belanja daerah dan realisasinya, realisasi belanja daerah selalu lebih rendah daripada anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Dari perolehan realisasi Pemerintah Kota Bandung yang baik, target anggaran seharusnya

dinaikan. Contohnya, pada tahun 2016 penetapan struktur APBD Kota Bandung 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 31 tahun 2016 tentang pedoman APBD, untuk tahun anggaran 2017 target diturunkan sebesar 16,86 % hal ini disangkut pautkan dengan pencapaian target pajak yang tidak terealisasi dengan baik pada tahun sebelumnya (sumber: www.pikiran-rakyat.com). Padahal menurut data Direktorat Jendral dan Perimbangan Keuangan (DJPK) tingkat realisasi pada tahun sebelumnya telah mencapai target 100%. Dengan pencapaian Pemerintah Kota Bandung beserta data yang diperoleh, dapat menunjukkan indikasi adanya kesenjangan anggaran pada Pemerintah Kota Bandung.

Faktor yang pertama dalam kesenjangan anggaran yaitu asimetri informasi. Dalam anggaran terkandung informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang selaras dengan tujuan suatu organisasi. Informasi yang tepat yang selaras dengan tujuan dan sesuai keadaan harus terdapat pada anggaran yang telah disusun. Seringkali dalam praktik penyusunan anggaran rentan terjadi ketimpangan informasi atau asimetri Informasi. Asimetri Informasi merupakan keadaan dimana prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup. Menurut teori keagenan asimetri informasi dapat timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen atau pihak yang berwenang dengan tujuan suatu organisasi.

Menurut Anthony Govindarajan, ketimpangan atau asimetri informasi ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan ketersediaan informasi dalam sebuah anggaran sehingga anggaran tidak dapat diandalkan sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan kinerja agen mengenai kinerjanya (Lestari dan Supadmi, 2017). Dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD, adanya ketimpangan informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan atas penyusunan anggaran daerah tersebut untuk mengatur tinggi atau rendahnya target pendapatan maupun belanja daerah yang dapat memicu terjadinya kesenjangan anggaran. (Lestari dan Supadmi, 2017) juga menyatakan asimetri informasi dapat diukur dengan kecukupan informasi, kualitas informasi yaitu informasi yang mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Kuantitas informasi yaitu informasi yang mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi dan yang terakhir adalah pemahaman terhadap informasi.

Faktor yang kedua yaitu partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran menurut Garrison dan Noren adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada tingkatan dalam pembuatan estimasi anggaran. Partisipasi Anggaran dapat menimbulkan kesenjangan anggaran atau *budgetary slack*. Dalam setiap penyusunan anggaran atau APBD, Pemerintah Daerah memerlukan suatu pertimbangan etika yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maupun pilar karakter nilai etika. Apabila setiap aparat penyusun anggaran daerah memiliki karakter etika yang baik maka dapat mencegah terjadinya kesenjangan anggaran.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Hanif dan Darsono (2015:206) Teori agensi mengeksplorasi bagaimana uraian tugas, kewenangan, tanggung jawab dan kompensasi dapat ditulis untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk melukiskan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak bonus. Hubungan agensi ada ketika satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu tugas (jasa), prinsipal mendelegasikan wewenangnya untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi yang berbeda dalam tujuan. Kejelasan kontrak yang terkait dengan kompensasi bonus akan mengurangi preferensi ini.

Teori agensi ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain seperti waktu luang, kondisi kerja yang menarik, dan jam kerja fleksibel.

Perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen timbul yang terkait dengan kompensasi, manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, prinsipal tidak dapat pernah merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan yang dapat menimbulkan asimetri informasi.

2.1.2 Asimetri Informasi

Asimetri informasi timbul dari teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Asimetri informasi menurut teori keagenan merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap suatu hal (Tresnayani dan Gayatri, 2016). Hal tersebut menyebabkan prinsipal tidak mampu menentukan usaha yang dilakukan agen apakah memang benar-benar optimal. Anggaran yang dilaporkan haruslah sesuai dengan kinerja yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan organisasi. Jika asimetri informasi terdapat pada suatu organisasi, maka otomatis anggaran

tidak dapat memenuhi dua fungsinya yaitu sebagai alat pengendalian dan sebagai alat perencanaan. Dalam beberapa hal, untuk memenuhi fungsi tersebut, anggaran dapat disusun dengan tingkat kesulitan yang sama. Akan tetapi, penentuan anggaran yang tepat mungkin tidak akan mudah dan akan menjadi masalah apabila bawahan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh atasan atau pun sebaliknya.

Bila informasi bawahan lebih baik dari pada atasan, maka bawahan mengambil kesempatan dalam partisipasi penganggaran dengan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi (agen), serta membuat anggaran yang mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran (dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan). Bawahan mengambil keputusan untuk memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, dengan membuat budget yang relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah kesenjangan anggaran (yaitu dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan) bahwa senjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetris karena informasi asimetris mendorong bawahan/pelaksana anggaran. Namun bila sebaliknya, menurut (Suartana 2010: 139 dalam Basyir, 2015) menjelaskan bahwa konsep informasi asimetri yaitu atasan mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai.

2.1.3 Partisipasi Anggaran

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap agen yang membuatnya. Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan individu dalam pelaksanaan proses penyusunan anggaran, tugas kerja yang harus dilaksanakan untuk periode tertentu (Tresnayani dan Gayatri, 2016). Teori ini juga diperkuat dengan penelitian (Basyir, 2016) menyatakan partisipasi anggaran adalah partisipasi aktif unit-unit organisasi mulai level bawah sampai atas dalam menyampaikan target anggaran yang disusun. Partisipasi penganggaran atau *participative budgeting* melibatkan semua tingkatan manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Keikutsertaan eksekutif atau agen dalam penyusunan dan penentuan anggaran tersebut diharapkan dapat mencapai keputusan yang realistis dan selaras tujuan organisasi. Akan tetapi dapat terjadi kesenjangan anggaran karena eksekutif atau agen diberikan kewenangan untuk menetapkan isi anggaran mereka dan akan dinilai kinerjanya berdasarkan anggaran tersebut partisipasi penganggaran ini diperlukan, karena bawahan yang lebih mengetahui kondisi langsung bagiannya.

2.1.4 Kesenjangan Anggaran

Kesenjangan anggaran didefinisikan sebagai *slack* yaitu selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut (Basyir, 2016). Manajer menciptakan slack dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah, dan biaya lebih tinggi, atau menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output. Hal ini juga sesuai dengan teori Anthony dan Govindarajan yang mendefinisikan kesenjangan anggaran adalah "*The difference between the budget amount and the best estimate is called*", yang berarti perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi terbaik dari organisasi (Fatmawati dan Widyaningsih, 2014). Kesenjangan anggaran merupakan ketidaksesuaian antara penggunaan dana yang lebih besar dari anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.5 Pengaruh Asimetri Informasi dan Kesenjangan Anggaran

Asimetri informasi timbul dari teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Asimetri informasi menurut teori keagenan merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap suatu hal (Tresnayani dan Gayatri, 2016). Menurut Anthony Govindarajan, ketimpangan atau asimetri informasi ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan ketersediaan informasi dalam sebuah anggaran sehingga anggaran tidak dapat diandalkan sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan kinerja agen mengenai kinerjanya (Lestari dan Supadmi, 2017). Adanya asimetri informasi ini sering kali dimanfaatkan oleh agen dengan tidak memberikan seluruh informasi yang dimilikinya dan membuat anggaran yang lebih mudah dicapai sehingga terciptalah kesenjangan anggaran. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen yang berpartisipasi dalam penganggaran dapat menimbulkan kesenjangan anggaran.

2.1.6 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan individu dalam pelaksanaan proses penyusunan anggaran, tugas kerja yang harus dilaksanakan untuk periode tertentu (Tresnayani dan Gayatri, 2016). Partisipasi penganggaran memberikan peluang bagi para bawahan/unit organisasi pemerintah untuk melakukan

kesenjangan anggaran. Ini dapat terjadi karena bawahan/unit organisasi pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan isi anggaran mereka dan akan dinilai kinerjanya berdasarkan anggaran tersebut. Dalam penyusunannya, anggaran dapat dipengaruhi oleh pendapat atau opini yang dapat menyebabkan suatu kesenjangan dalam anggaran meningkat. Sehingga dapat dikatakan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. Beberapa penelitian yang mengatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran.

2.2 Metode Penelitian

Tipe penyelidikan yang dipakai adalah penelitian kausal. Unit analysis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu SKPD Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh, dimana sampel berjumlah sama dengan populasi yaitu sebanyak 43 terdiri dari Kepala Kasubag Perencanaan di SKPD Kota Bandung. Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut :

$$Y = a + b_1AI + b_2PA + e$$

Keterangan :

Y = Kesenjangan Anggaran

AI = Asimetri Informasi

PA = Partisipasi Anggaran

α = Konstanta (nilai Y apabila X=0)

b = Koefisien Regresi

e = Epsilon atau *error term*

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Responden yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur pengaruh asimetri informasi dan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kota Bandung. Peneliti mendistribusikan kuesioner ke seluruh SKPD Kota Bandung dan diperoleh sebanyak 43 responden.

Tabel 3.1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
Asimetri Informasi	1290	892	66,8%	Sedang
Partisipasi Anggaran	1290	917	71,10%	Tinggi
Kesenjangan Anggaran	1935	1322	68,32%	Tinggi

3.2 Analisis Linear Berganda

Koefisien regresi nilai konstanta adalah sebesar 12,032. Koefisien regresi asimetri informasi adalah sebesar 0,451 dan koefisien regresi partisipasi anggaran adalah sebesar 0,445. Dengan demikian dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,032 + 0,451AI + 0,445PA + e$$

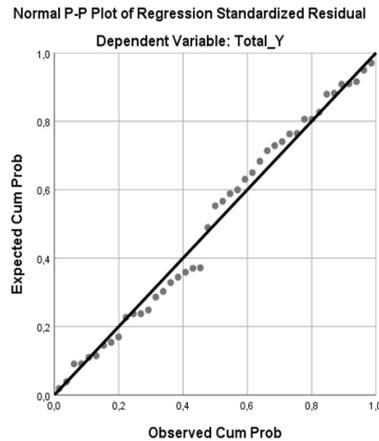
Persamaan tersebut menggambarkan apabila variabel independen atau (X) sebesar satu satuan dan nilai lainnya dianggap konstan, maka variabel dependen (Y) akan naik sebesar koefisien regresinya. Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,032 menunjukkan bahwa jika variabel asimetri informasi dan partisipasi anggaran bernilai nol, maka nilai kesenjangan anggaran sebesar 12,032.
2. Koefisien regresi sebesar 0,451 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan asimetri informasi, maka kesenjangan anggaran mengalami kenaikan sebesar 0,451.
3. Koefisien regresi sebesar 0,445 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan partisipasi anggaran, maka kesenjangan anggaran mengalami kenaikan sebesar 0,445.

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas

Berdasarkan tampilan grafik *normal probability plot* pada gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penyebaran data memberikan pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari kedua grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini karena telah memenuhi kriteria asumsi normalitas.

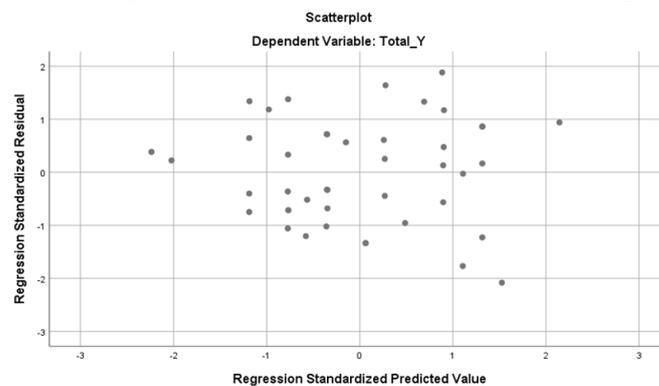


3.3.2 Uji Multikolinearitas

Nilai Tolerance masing-masing variabel partisipasi anggaran dan pertimbangan etika memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel asimetri informasi dan partisipasi anggaran.

3.3.3 Uji Heterokedastis

Grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai untuk memprediksi kesenjangan Anggaran (Y) berdasarkan masukan b variabel independen kejelasan asimetri informasi (X1) dan partisipasi anggaran (X2).



Gambar 3.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Simultan F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yaitu Asimetri Informasi (X1) dan partisipasi anggaran (X2) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu Kesenjangan Anggaran (Y). Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka variabel independen (X) dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen (Y) secara simultan. Hasil pengolahan data yang dibantu oleh software SPSS 25 pada uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Uji Simultan F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	193,446	2	96,723	11,737	,000 ^b
	Residual	329,624	40	8,241		
	Total	523,070	42			

a. Dependent Variable: Total_KA

b. Predictors: (Constant), Total_AI, Total_PA

Sumber: *Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2019)*

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($<0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa asimetri informasi (X1) dan partisipasi anggaran (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran (Y).

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Hasil pengolahan data yang dibantu oleh software SPSS 25 pada perhitungan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,608 ^a	,370	,338	2,871

a. Predictors: (Constant), Total_PA, Total_AI

b. Dependent Variable: Total_KA

Sumber: *Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2019)*

Nilai Adjusted R Square adalah sebesar 37%. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel independen (bebas) yaitu asimetri informasi (X1) dan partisipasi anggaran (X2) mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu Kesenjangan anggaran (Y) sebesar 0.37%. Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

3.4.2 Uji Parsial (t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (bebas) asimetri informasi (X1) dan partisipasi anggaran (X2) secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu kesenjangan anggaran (Y). Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka variabel independen (X) dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen (Y) secara individual (parsial). Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada setiap variabel memiliki nilai yang berbeda. Variabel asimetri informasi (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($<0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa asimetri informasi (X1) secara parsial berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kesenjangan anggaran (Y).

Variabel partisipasi anggaran (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006. Hal tersebut juga menunjukkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa partisipasi anggaran (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran (Y).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Asimetri informasi dan Partisipasi anggaran Terhadap Kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) yang ditunjukkan pada tabel 4.10, tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau di bawah 0.05 (5%) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut

berarti bahwa asimetri informasi dan partisipasi anggaran memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kesenjangan anggaran. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi yang digambarkan pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,37 (37%) yang berarti kedua variabel independen yaitu asimetri informasi dan partisipasi anggaran dapat mempengaruhi variabel kesenjangan anggaran sebesar 37%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3.2 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kesenjangan Anggaran pada SKPD Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan pada tabel 4.12, tingkat signifikansi asimetri informasi adalah sebesar 0,005 atau kurang dari 0,05 (5%) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung. Serta hasil analisis berganda yang menghasilkan koefisien regresi asimetri sebesar 0,451. Adanya asimetri informasi memunculkan kebijakan, dimana bawahan ikut terlibat dalam penyusunan anggaran dan memiliki pengaruh dalam menentukan anggaran akhir. Sehingga apabila asimetri informasi semakin tinggi, maka kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung akan semakin meningkat. Teori keagenan menyatakan asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap satu hal, sehingga seharusnya asimetri informasi pada suatu organisasi harus diminimalisir. Hal ini didukung hasil uji analisis statistik deskriptif yang menyatakan tanggapan responden menunjukkan asimetri informasi pada SKPD Kota Bandung memiliki tingkat asimetri informasi di atas 69%.

4.3.3 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran pada SKPD Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan pada tabel 4.12, tingkat signifikansi partisipasi anggaran adalah sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai koefisien dari variabel partisipasi anggaran adalah 0,445. Dalam suatu organisasi partisipasi anggaran dapat memicu timbulnya kesenjangan anggaran pada suatu organisasi. Memberikan kewenangan yang cukup luas pada bawahan dapat menimbulkan adanya kesempatan dalam penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menimbulkan adanya suatu kesenjangan anggaran dalam suatu organisasi. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan variabel partisipasi anggaran menghasilkan persentase sebesar 71,1%, dapat dikatakan bahwa partisipasi anggaran pada SKPD Kota Bandung tergolong tinggi.

4. Kesimpulan

1. Hasil statistik deskriptif dari tanggapan responden yang telah dikategorikan sesuai dengan *skala Likert* mengenai tinggi rendahnya tiap variabel yaitu:
 - a. Tingkat asimetri informasi pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung menghasilkan persentase sebesar 69% tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa bawahan (Kasubag Perencanaan) mempunyai informasi atau pengetahuan yang lebih baik daripada atasan (Kepala Dinas) mengenai lingkup tanggung jawabnya sebagai penyusun anggaran pada SKPD Kota Bandung.
 - b. Tingkat partisipasi anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung menghasilkan persentase sebesar 71,1% tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa atasan (Kepala Dinas) memberikan kewenangan sehingga bawahan (Kasubag Perencanaan) terlibat langsung dalam penyusunan anggaran pada tiap SKPD Kota Bandung.
 - c. Tingkat kesenjangan anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung menghasilkan persentase sebesar 68,32% tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa pada penyusunan anggaran di SKPD Kota Bandung terdapat ketidaksesuaian jumlah dengan estimasi terbaik yang seharusnya dapat dihasilkan.
2. Secara simultan asimetri informasi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh bahwa:
 - a. Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kesenjangan Anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung tahun 2019.
 - b. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kesenjangan Anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung tahun 2019.

Daftar Pustaka

- [1] Ardianti, Hapsari. P. N., dkk (2015). *Pengaruh Penganggaran Partisipatif pada Budgetary slack dengan Asimetri Informasi, Self Esteem, Locus of Control dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Udayana. No. 4, Volume 05, ISSN: 2337-3067.
- [2] Bastian, Indra. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. (edisi ke empat) Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Basyir, Azmi. A. (2016). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Kapasitas Individu terhadap Budgetary slack pada SKPD Pemerintah Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman. Vol 13, No. 2, ISSN : 2528-1135.
- [4] Bhilawa, Loggar dan Kautsar, Achmad. (2018). *The Determinants of Relationship Between Budgetary and Budgetary Slack*. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. Vol 8 No2, ISSN: 2225-8329.
- [5] Darise, Nurlan. (2015). *Pengelolaan Keuangan Daerah (edisi 2)*. Jakarta Barat :Indeks.
- [6] Dinas Pemerintah Kota Bandung tersedia: <https://bppd.bandung.go.id/>. [22 Oktober 2018].
- [7] Direktorat Jendral dan Perimbangan Keuangan (DJPK): <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. [22 Oktober 2018].
- [8] Etemadi, Hossein dan Sirghani, Saeed. (2016). *The effect of Budget Slack Creation and Budget Internal Control by Managers on Maximization of Utility Function in Budgetary Participation*. International Journal of Finance and Managerial Accounting Vol 1, No 2.
- [9] Fatmawati, Ifat dan Widyaningsih, Aristanti. (2014). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran: Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating*. Universitas Pendidikan Indonesia Vol 2, No.2, ISSN: 20216- 3291.
- [10] Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [11] Hanif dan Prawinogoro, Darsono. (2015). *Sistem Pengendalian Manajemen dan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- [12] Indrawati. (2015). *Metodologi Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi dan Komunikasi dan Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- [13] Irfan, Muh. Dkk. (2016). *Pengaruh partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2 ISSN 20191-9139.
- [14] Kridawan, Aji dan Mahmud, Amir. (2014) *Pengaruh Asimetri informasi Terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Variabel Pemoderasi*. Accounting Analysis Journal, Vol 3, No 2 ISSN 2252-6765.
- [15] Lestari, Diah dan Supadmi, Ni Luh. (2017). *Asimetri Informasi dan Penekanan Anggaran sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran*. Universitas Udayana. Vol 19. No.3, ISSN : 2302-8556.
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- [17] Rifqi, Abdullah, Robith dkk. (2017). *The effect of Budgetary Slack with External Pressure as Moderating Variable* Journal Accounting Bussines Education. Vol. 2, No. 1, ISSN: 2528-7281.
- [18] Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi 6 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [19] Sihombing, Yosephine. M dan Rohman, Abdul. (2017). *Analisis Pengaruh Anggaran Partisipatif terhadap Budgetary slack dengan Pertimbangan Etika sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Diponegoro. Vol.6, No 3.
- [20] Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Suhartini, Dwi dkk. (2015). *Budgetary Slack and Managerial Performance Models: Gender Perspective*. European Journal of Business and Management Vol 7, No 29 ISSN: 2222-2839.
- [22] Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [23] Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [24] Suriani, Seri dkk. (2018). *Moderation of Information Asymetri, Self Esteem to the Effect of Participatory Budgeting on Budgetary Slack Government of South Sulawesi Province*. International Journal of Advance Engineering Research and Science Vol 5, ISSN: 2349-6995.
- [25] Tresnayani, Ardi, Luh Gede dan Gayatri. (2016). *Pengaruh Partispasi Anggaran, Asimetri Informasi, Kapasitas Individu dan Asimetri informasi terhadap Potensi Terjadinya Budgetary slack*. Vol. 16 No. 2, ISSN: 2302-8556.
- [26] Umar, Syafik.H. (2016, 5 Desember). *Struktur APBD Kota Bandung Turun 16,88% Karena Hal Ini*. Pikiran Rakyat [online], Tersedia: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/05/struktur-apbd-kota-bandung-turun-1686-karena-hal-ini-386891>. [20 Oktober 2018]
- [27] Undang-undang Republik Indonesia No. 23 pasal 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

^[28]Widyaningtyas, Putu Bunga dan Sari, Ratna. (2017). *Group Cohesiviness Sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis dan Asimetri Informasi pada Budgetary slack*. Universitas Udayana. Vol. 20 No. 2, ISSN: 2302-85556.

